

## Implementasi Strategi Adaptif Indonesia dalam Merespon Tekanan Internal dan Eksternal Terkait Gerakan Kemerdekaan Papua

Hidayat Chusnul Chotimah<sup>1</sup>, Muhammad Rizki Maulana<sup>2</sup>

<sup>1</sup> Universitas Teknologi Yogyakarta and [hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id](mailto:hidayat.chotimah@staff.uty.ac.id)

<sup>2</sup> Universitas Teknologi Yogyakarta and [maulanarizki74114@gmail.com](mailto:maulanarizki74114@gmail.com)

---

### ABSTRAK

---

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi yang dilakukan oleh Indonesia dalam merespon tekanan internal dan eksternal terkait gerakan pro-kemerdekaan di Papua. Gerakan kemerdekaan Papua telah lama diluncurkan oleh berbagai kelompok separatis yang tidak menerima hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) 1959. Gerakan separatisme ini terus bermunculan dengan berfokus pada perjuangan di lingkup lokal, nasional maupun internasional sehingga menghasilkan gerakan-gerakan pro-kemerdekaan yang mengancam stabilitas nasional negara Indonesia. Bahkan komunitas internasional banyak yang memberikan kritikan atas tindakan Pemerintah Indonesia dalam menangani masalah gerakan pro-kemerdekaan Papua yang dianggap melanggar hak asasi manusia. Oleh sebab itu, Pemerintah Indonesia menerapkan strategi *adaptation preservative* untuk merespon tuntutan perubahan yang terjadi di lingkungan internal maupun eksternal melalui teori kebijakan luar negeri dan konsep *adaptive behavior*. Melalui pendekatan penelitian kualitatif, peneliti melakukan pengumpulan data yang sesuai dengan objek penelitian yang diangkat dari data-data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi Indonesia untuk merespon tuntutan eksternal yaitu dengan memberikan bantuan internasional melalui Indonesian AID ke negara-negara yang melakukan kritikan terhadap isu pelanggaran HAM di Papua maupun dengan mempererat kerja sama internasional melalui keterlibatan aktif Indonesia dalam Melanesian Spearhead Group (MSG). Sedangkan strategi adaptif yang ditunjukkan untuk merespon tuntutan internal dilakukan dengan memberikan label terhadap Operasi Papua Merdeka (OPM) sebagai gerakan teroris dan melakukan pemekaran wilayah di Papua dengan melakukan revisi terhadap Undang-Undang Otonomi Khusus Papua.

*Kata Kunci: Strategi Adaptif, Gerakan Separatisme, Pemerintah Indonesia, Papua.*

### ABSTRACT

---

This study aims to analyze the strategies undertaken by Indonesia in responding to internal and external pressures related to the pro-independence movement in Papua. The Papuan independence movement has long been launched by various separatist groups who do not accept the results of the 1959 Act of Free Choice (Pepera). This separatist movement continues to emerge, focusing on struggles at local, national, and international levels, resulting in pro-independence movements that threaten the national stability of Indonesia. Even the international community has criticized the Indonesian Government's actions in handling the problem of the Papuan pro-independence movement, which is considered to violate human rights. Therefore, the Indonesian Government applies a preservative adaptation strategy to respond to demands for change occurring in the internal and external environment through foreign policy theory and the concept of adaptive behavior. Through a qualitative research approach, researchers collected data in accordance with the research object taken from secondary data. The results indicate that Indonesia's strategy to respond to external demands is by providing international assistance through Indonesian AID to countries that criticize the issue of human rights violations in Papua and by strengthening international cooperation through Indonesia's active involvement in the Melanesian Spearhead Group (MSG). Meanwhile, the adaptive strategy demonstrated to respond to internal demands was carried out by labeling the Free Papua Operation (OPM) as a terrorist movement and carrying out regional expansion in Papua by revising the Papua Special Autonomy Law.

*Keywords: Adaptive Strategy, Separatist Movement, Indonesian Government, Papua.*

---

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan suku, agama, adat istiadat maupun budaya yang berbeda-beda. Keberagaman tersebut dapat menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, di mana dapat memicu adanya konflik internal yang terjadi di wilayah Indonesia. Salah satu konflik internal yang dapat terjadi yaitu munculnya gerakan separatisme. Separatisme merupakan sebuah aksi yang dilakukan oleh suatu kelompok yang berada di suatu negara berdaulat atau wilayah untuk memisahkan diri dan menjadikan wilayah tersebut merdeka serta berdiri secara *independent*. Sejumlah gerakan separatisme yang pernah dihadapi dan diredam oleh Indonesia seperti gerakan separatisme yang ada di Aceh, Papua, dan Timor Timur. Namun demikian, salah satu gerakan separatisme yang hingga saat ini masih belum mampu diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia yaitu gerakan separatisme di wilayah Papua yang dilakukan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) maupun transformasinya (Nugroho et al., 2023).

OPM merupakan sebuah gerakan yang didirikan pada tahun 1965 dengan tujuan untuk memisahkan wilayah Papua Barat dan merdeka dari Indonesia. Penyebab gerakan ini muncul utamanya dikarenakan adanya kekecewaan dari masyarakat Papua Barat terhadap Pemerintah Indonesia. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama munculnya kekecewaan masyarakat Papua Barat terhadap Pemerintah Indonesia. Kesenjangan ekonomi di antara wilayah di Papua yang lebih maju dengan wilayah terpencil sangat terlihat jelas dan pengelolaan ekonomi yang dianggap gagal karena pembangunan kesejahteraan yang tidak merata (Febrian, Adriansyah & Dewi, 2024). Hingga saat ini OPM merupakan sebuah gerakan separatisme yang masih ada dan aktif di Indonesia. Para kelompok OPM ini bahkan sampai memiliki bendera sendiri dan pernah mengibarkan bendera tersebut di wilayah Indonesia yang menandakan bahwa gerakan dan perjuangan mereka untuk memisahkan diri dari Indonesia itu sangat nyata. Gerakan separatisme ini memberikan ancaman bagi keutuhan bangsa Indonesia, sehingga Pemerintah harus menangani masalah ini agar keutuhan bangsa Indonesia tetap terjaga. Untuk menangani masalah tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan untuk menangani OPM melalui pendekatan militer. Namun, nyatanya upaya melalui pendekatan militer ini malah menimbulkan pelanggaran HAM di Papua. Bahkan isu pelanggaran HAM tersebut telah menarik perhatian dunia internasional khususnya dari negara-negara di kawasan Pasifik Selatan seperti Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Ketiga negara tersebut membawa kritikan terhadap isu pelanggaran HAM di Papua yang dilakukan oleh Indonesia ke sidang Majelis Umum PBB. Hal ini yang kemudian menjadi pendorong bagi PBB sebagai organisasi internasional untuk turut mengkritik Indonesia atas dugaan terjadinya pelanggaran HAM di Papua tersebut, bahkan isu tersebut dibawa ke dalam forum *side event* di Genewa oleh Dewan PBB. Di dalam forum tersebut Komite HAM PBB menyoroti Indonesia yang dianggap tidak serius dalam menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua (Prasetyo & Zahidi, 2022).

Aksi-aksi bersenjata dan kampanye internasional gerakan separatis Papua merupakan gambaran dari masih adanya kelompok-kelompok dalam masyarakat Papua yang belum menerima hasil Pepera (Penentuan Pendapat Rakyat) tahun 1959. Muncul dan maraknya kembali gerakan separatisme Papua, yang diikuti dengan berbagai kampanye internasional dan perjuangan di arena diplomasi internasional, telah menjadikan isu Papua yang semula isunya lebih ke isu lokal, menjadi meluas memberikan perhatian (komunitas) internasional. Dalam hal ini, internasionalisasi isu Papua adalah buah dari kebijakan sekuritisasi Papua selama periode Soeharto, maupun gagalannya kebijakan otonomi khusus di era reformasi (Nainggolan, 2014).

Kondisi ini membuat Pemerintah Indonesia menjadi terancam stabilitas nasional dan keutuhan wilayahnya dengan berbagai kritikan-kritikan dari pihak luar. Oleh sebab itu, penelitian ini akan mengkaji tentang bagaimana upaya Pemerintah Indonesia dalam menerapkan strategi adaptif preservatif untuk merespon tekanan internal dari gerakan kemerdekaan Papua maupun tekanan eksternal dari adanya kecaman internasional. Penelitian terkait gerakan kemerdekaan Papua ataupun Operasi Papua Merdeka sendiri sudah banyak dilakukan. Pertama, tulisan dari Bramasta dan Nuryananda (2021), yang menjelaskan tentang bagaimana upaya pemerintah Indonesia dalam meredam isu Papua melalui bantuan luar negeri terhadap Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon. Kedua, tulisan dari Sahanda (2020) yang lebih menekankan peran dari diplomasi publik Indonesia kepada negara-negara di kawasan Asia Pasifik Selatan terkait OPM. Upaya diplomasi publik dari Pemerintah Indonesia ini merupakan strategi yang digunakan untuk menghentikan OPM dalam mencari simpati dan dukungan dari negara-negara Pasifik Selatan. Ketiga, tulisan dari Natalia (2021) dimana isu Papua merdeka menjadi fokus utama dari tulisan ini dan Vanuatu sebagai negara yang menjadi tujuan diplomasi dari Indonesia. Vanuatu merupakan salah satu negara yang kerap mendukung kemerdekaan Papua. Strategi yang dilakukan oleh Indonesia melalui hubungan diplomatik dengan melakukan kerja sama ekonomi, kerja sama pembangunan kapasitas, dan pemberian beasiswa bagi pemuda Vanuatu untuk belajar di Indonesia. Ketiga tulisan tersebut tentunya cukup berbeda dengan tulisan ini karena fokus dari pendekatan yang digunakan dalam tulisan ini lebih menekankan pada penggunaan strategi adaptif preservatif sebagai bentuk kebijakan luar negeri Indonesia atas perubahan di lingkungan internal dan eksternal mengenai isu Papua.

## LANDASAN TEORI

### A. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri menurut K.J. Holsti merupakan sebuah rancangan ide atau gagasan untuk membuat suatu rumusan yang bertujuan agar dapat memecahkan suatu masalah atau upaya dalam melakukan sebuah perubahan-perubahan pada suatu wilayah. Christopher Hill mengartikan kebijakan luar negeri merupakan kolaborasi antara politik domestik dan internasional. Sehingga, kebijakan luar negeri sifatnya dinamis dan dapat berubah sewaktu-waktu. Hal tersebut dikarenakan kebijakan luar negeri berorientasi pada tujuan. Christopher membagi perubahan kebijakan luar negeri menjadi empat. Pertama *adjustment changes*, dalam jenis ini sebuah negara akan melakukan perubahan pada usaha yang dilakukan dalam menjalankan kebijakan luar negerinya untuk mencapai sebuah target yang diinginkan. Akan tetapi, tujuan awal dan cara dalam menjalankan kebijakannya tidak berubah hanya meningkatkan usahanya. Kedua *program changes*, pada jenis ini negara akan melakukan perubahan pada program atau cara pelaksanaan kebijakannya, sementara itu tujuannya tidak berubah dan tetap pada tujuan awal dibuatkan kebijakan. Ketiga *problem orientation changes*, perubahan pada jenis ini yaitu negara akan merubah seluruh kebijakannya, dikarenakan tujuan awal yang diinginkan mengalami perubahan. Terakhir *international orientation changes*, ini merupakan level paling atas dari perubahan yang dilakukan oleh sebuah negara terhadap kebijakan luar negerinya. Perubahan ini disebabkan oleh adanya haluan sikap sebuah negara terhadap politik luar

negeri. Dengan melihat penjelasan tersebut maka sebuah kebijakan luar negeri dapat berubah sewaktu-waktu berdasarkan penyesuaian terhadap faktor internal dan eksternal dari negara tersebut (Hasly, 2020).

### B. Konsep *Adaptive Behavior*

Konsep *adaptive behavior* menurut Rosenau merupakan sebuah proses adaptasi yang dilakukan suatu negara untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dinamika politik internasional yang mempunyai relevansi dan dampak fundamental atas struktur domestiknya. Dalam analogi yang diberikan Rosenau, menggambarkan negara merupakan sebuah *society* (masyarakat) dan struktur internasional merupakan sebuah *environment* (lingkungan). Artinya, ketika sebuah negara berpartisipasi dalam sebuah isu yang memiliki relevansi terhadap struktur atau kebutuhan domestiknya, itu merupakan sebuah bentuk *salient environment*. *Salient environment* adalah suatu upaya sebuah negara dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan baik dari eksternal maupun internal yang berdampak bagi struktur domestik atau kebutuhan negaranya. Sehingga, negara-negara akan memilih strategi terbaik untuk merespon dan menyesuaikan diri terhadap perubahan struktur internasional. Menurut konsep ini, kebijakan luar negeri suatu negara dapat dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu perubahan internal (*internal change/ structural change*), perubahan eksternal (*external change*), dan peran pemimpin (*leadership roles*) (Alif, Putranti, & Wahyudi, 2022).

Perspektif ini memandang bahwa semua negara merupakan sebuah entitas yang hakikatnya akan terus melakukan adaptasi terhadap lingkungannya. Sehingga, pusat perhatian dalam perspektif ini yaitu proses tindakan negara dalam beradaptasi sebagai respon dari adanya perubahan lingkungan baik itu internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah harus bisa melakukan penyeimbangan pada saat terjadi tekanan internal dan tuntutan eksternal agar dapat bertahan dan mencapai tujuan nasional. Tidak dipungkiri, dalam proses upaya penyeimbangan bisa saja terjadi disintegrasi dan banyak resiko lainnya. Kebijakan luar negeri sering terjadi perubahan pada saat tuntutan dari lingkungan internal semakin meningkat dikarenakan kondisi di lingkungan eksternal mengalami perkembangan yang dianggap berpotensi mengancam keberadaan negara tersebut (Yani, 2017).

Rosenau memberikan empat model *adaptive behavior* yang kemungkinan dilakukan oleh suatu negara sebagai respon dari adanya perubahan baik pada tingkat domestik (*internal*) dan internasional (*eksternal*) yaitu:

1. *Acquiescent Adaptation*, negara mencoba untuk mempertahankan struktur esensialnya berdasarkan batasan-batasan yang dapat diterima melalui penyesuaian struktur-struktur berdasarkan *external change*. Struktur esensial merupakan sebuah pola hubungan yang berkaitan satu sama lain sehingga membentuk suatu kehidupan sosial, ekonomi, politik pada suatu masyarakat.

2. *Intrasigent Adaptation*, model ini lebih memperhatikan tuntutan dan perubahan dari internal serta mencoba mempengaruhi lingkungan eksternalnya sesuai dengan lingkungan internal.
3. *Promotive Adaptation*, pada model ini para pembuat kebijakan tidak responsif baik terhadap lingkungan internal maupun lingkungan eksternalnya.
4. *Preservative Adaptation*, model ini kebalikan dari model ketiga, di mana negara akan responsif terhadap kedua perubahan yang terjadi di lingkungan internal dan eksternal (Petersen, 1977).

Dari empat orientasi dasar yang disebutkan Rosenau, beberapa di antaranya dianggap sangat kecil kemungkinannya untuk terjadi. Misalnya pada model *acquiescent adaptation* ke intransigen, Rosenau menganggap bahwa perubahan yang ada hampir tidak mungkin terjadi karena hal itu mengandaikan adanya perubahan besar baik dalam sistem internasional maupun domestik secara terpisah. Sedangkan pada model *preservative adaptation*, Rosenau menyebutkan bahwa perubahan yang terjadi lebih mungkin terjadi dengan mengacu pada premis interdependensi. Dalam hal ini, interdependensi sebagai fakta dalam kehidupan internasional tidak mampu dihalangi, di mana pergerakan manusia, ide, dan barang melintasi batas-batas negara mereka, dan hal ini pada akhirnya akan menyebabkan politik internasional menjadi suatu permainan yang rumit dari kebijakan-kebijakan preservatif yang diterapkan atau dipilih oleh semua negara bangsa untuk meresponnya (Petersen, 1977). Oleh sebab itu, dalam penelitian ini juga akan lebih menekankan penggunaan model adaptasi preservatif sebagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Indonesia dalam merespon tekanan internal dan eksternal terkait gerakan kemerdekaan Papua yang telah dilancarkan oleh berbagai organisasi baik di tingkat nasional maupun internasional.

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif deskriptif. Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang dapat menghasilkan suatu data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun secara lisan dari objek yang diamati selama penelitian berlangsung (Moleong, 2018). Pendekatan ini bertujuan untuk membuat sebuah narasi atau gambaran yang memiliki sifat deskriptif dari sebuah fenomena yang terjadi. Sementara objek yang diambil penulis adalah mengenai bagaimana strategi adaptif pemerintah Indonesia dalam merespon gerakan kemerdekaan Papuan. Selanjutnya, dalam proses analisis, penulis mengumpulkan data-data dan informasi yang diperoleh dari studi kepustakaan, dokumen-dokumen resmi berupa laporan resmi organisasi dan pemerintah, jurnal, buku-buku, media massa, maupun sumber lain dari internet seperti berita-berita yang memiliki keterkaitan dengan strategi adaptif Indonesia dalam merespon kecaman internasional (eksternal) maupun internal tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Papua Merdeka merupakan salah satu isu gerakan separatisme yang mengancam keutuhan wilayah Indonesia. Gerakan ini terdiri dari tiga elemen: sekelompok unit bersenjata yang berbeda, masing-masing dengan kendali teritorial terbatas, yang tidak tunduk kepada satu komandan pun; beberapa kelompok di dalam Papua yang melalui demonstrasi dan protes mengekspresikan rasa ketidakadilan dan kebencian yang jauh lebih luas; dan sekelompok kecil pemimpin yang berbasis di luar negeri, yang mencoba meningkatkan kesadaran akan isu-isu Papua dengan tujuan menggalang dukungan internasional untuk kemerdekaan (IPAC, 2015). Salah satu organisasi yang menjadi wadah perjuangan Papua merdeka yaitu OPM. Gerakan kemerdekaan Papua sendiri telah bertransformasi sedemikian rupa dari tahun ke tahun. Masing-masing dari tiga koalisi pro-kemerdekaan terkemuka telah dibentuk seperti Otoritas Nasional Papua Barat (WPNA), Koalisi Nasional Papua Barat untuk Pembebasan (National Coalition for Liberation/ WPNCL), dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB). Namun koalisi pro-kemerdekaan tersebut masih gagal untuk menyatukan OPM bersenjata dan menempatkannya di bawah kepemimpinan politik. Sementara itu, pada bulan Desember 2014, dibentuklah Persatuan Gerakan Pembebasan Papua atau United Liberation Movement for Free West Papua (ULMWP) di Vanuatu (IPAC, 2015) yang merupakan salah satu organisasi pro-kemerdekaan yang masif melakukan perjuangan di tingkat lokal, nasional maupun internasional.

ULMWP merupakan pengintegrasian dari tiga organisasi utama gerakan kemerdekaan Papua, yakni NRFPB (Federal Republic of West Papua), WPNCL, NPWP (National Parliament of West Papua), serta KPNB. ULMWP juga telah membentuk sekretariat eksternal yang terdiri dari lima anggota terpilih untuk mengkoordinir perjuangan mereka dan menyebarkan aspirasi mereka. Sekretaris Jenderal pertama dari ULMWP yaitu Octovianus Mote, yang merupakan mantan wartawan yang bermukim di Amerika Serikat (<https://indoprogress.com>). Sementara Kantor ULMWP di Papua Barat didirikan di Wamena, dan diresmikan pada 15 Februari 2016.

Pembentukan ULMWP telah mempercepat dinamika perjuangan gerakan separatisme Papua merdeka. Bahkan tuntutan yang muncul tidak hanya dari internal saja melainkan juga dari eksternal. ULMWP berupaya mendapatkan pengakuan dari negara-negara Melanesia di kawasan Pasifik Selatan dengan mengajukan keanggotaan penuh ke Melanesian Spearhead Group (MSG). Bahkan pada 15 Juli 2016 di Yogyakarta, beberapa mahasiswa Papua Barat yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), mengorganisir diri dengan nama Persatuan Rakyat untuk Pembebasan Papua Barat, melakukan *long march* mendukung permohonan ULMWP dalam keanggotaan penuh MSG dan tuntutan untuk melakukan referendum Papua (Pamuji et al., 2020). Adanya aksi tersebut tentu dihalangi oleh aparat keamanan Pemerintah Indonesia karena dianggap sebagai tindakan mendukung gerakan separatisme Papua Merdeka.

Gerakan AMP secara damai juga dilakukan di kota-kota lain, seperti Malang, Surabaya, Jakarta, Bandung dan kota-kota lain. Tuntutan yang dibawa seputar isu pelanggaran HAM maupun rasisme terhadap rakyat Papua yang harus diselesaikan oleh Pemerintah Indonesia maupun gerakan pro-kemerdekaan Papua barat. Separatis Papua Merdeka menggunakan kasus rasisme di Papua Barat untuk menuntut referendum dari pemerintah Indonesia. Pada Agustus-September tahun 2019 beberapa insiden rasisme di Surabaya juga terjadi yang diduga diinisiasi oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) dan ULMWP yang memanfaatkan para mahasiswa melakukan kerusuhan dan menginginkan adanya agenda referendum. Rasisme yang menimpa mahasiswa Papua di Surabaya pada 16 Agustus 2019, memicu serangkaian protes atas rasisme di Indonesia. Dari 19 Agustus hingga

30 September 2019, warga Papua di Jayapura, Sorong, dan Manokwari turun ke jalan. Mereka menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi yang dialami mahasiswa Papua. Peristiwa ini juga memicu protes yang sebagian didalangi oleh aktivis separatis Papua. Protes tersebut menjadi momentum untuk menuntut referendum bagi warga Papua maupun aksi pengibaran bendera Bintang Kejora di beberapa tempat. Rentetan kerusuhan tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa dan kerugian materi. Di sisi lain, ULMWP menggunakan insiden rasisme di Surabaya untuk mengangkat isu tersebut ke kancah internasional. ULMWP juga meminta bantuan dari negara-negara Melanesia lainnya seperti Vanuatu, Kepulauan Solomon, dan Fiji untuk mendukung pemisahan Papua Barat dari Indonesia. Bahkan mereka mendesak PBB untuk mendesak Indonesia terkait isu rasisme dan perlunya referendum (We Need To Talk About West Papua Team, 2021). ULMWP sendiri pada tanggal 1 Desember 2020 melalui Ketuanya, Benny Wenda, mendeklarasikan Negara Papua Barat dari Inggris (tempat domisili Benny Wenda), sekaligus mengumumkan dirinya sebagai Presiden pemerintahan sementara Negara Republik Papua Barat (Martianto & Isnaini, 2021).

Beberapa kampanye di level internasional yang telah dilakukan oleh ULMWP sejak berdiri hingga deklarasi pemerintah sementara Papua barat dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Upaya Kampanye Internasional oleh ULMWP Sejak 2016-2021

Tanggal	Peristiwa
Februari 2016	Kantor ULMWP resmi dibuka di Wamena, dihadiri lebih dari 5.000 orang.
Mei 2016	Deklarasi Westminster ditandatangani di London untuk referendum penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan PBB.
September 2016	Para pemimpin Pasifik menyerukan tindakan PBB terkait pelanggaran HAM di Papua pada Sidang Umum PBB ke-71.
Maret 2017	Vanuatu membuat pernyataan bersama di Dewan HAM PBB terkait pelanggaran HAM di Papua.
September 2017	Pemimpin Pasifik & Karibia angkat isu Papua di Sidang Umum PBB ke-72. Vanuatu dan Solomon Islands serukan penentuan nasib sendiri.
September 2017	Petisi 1,8 juta dari tanda tangan rakyat Papua diselundupkan ke markas PBB di New York.
September 2017	Petisi rakyat Papua diserahkan oleh Benny Wenda dan Rex Rumakiek kepada Ketua Komite Dekolonisasi PBB (C-24).
Januari 2019	Benny Wenda menyerahkan petisi rakyat Papua kepada Komisioner Tinggi HAM PBB, Michelle Bachelet, di Jenewa.
Agustus 2019	Forum Kepulauan Pasifik menyerukan agar Komisioner Tinggi HAM PBB diizinkan masuk ke Papua dan mengatasi akar konflik.
Desember 2019	Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS) menyerukan agar isu Papua menjadi agenda tetap di Dewan HAM PBB.
Desember 2020	ULMWP mengumumkan pembentukan Pemerintahan Sementara Papua Barat. Benny Wenda sebagai Presiden Sementara, Edison Waromi sebagai Perdana Menteri.
Mei 2021	ULMWP umumkan 12 departemen pemerintahan bawah tanah di Papua, mencakup kebijakan politik hingga lingkungan.

Sumber: (ULMWP, n.d.)

Meskipun ULMWP telah mendeklarasikan diri dan melakukan perjuangan pro-kemerdekaan Papua, namun kelompok tersebut dibantah keberadaannya oleh OPM. OPM menganggap bahwa gerakan yang dilakukan oleh ULMPW bertentangan dengan gerakan pembebasan Papua yang tengah dibangun OPM dan organisasi lain (CNN Indonesia, 2020). Dalam hal ini, sebelumnya OPM ikut mendirikan ULMWP pada 2014 silam di Vanuatu. Namun, pada 2016, OPM menganggap Benny Wenda bertindak sebagai pemimpin kelompok yang tidak mereka akui

dan dianggap mulai mengintervensi ULMWP sehingga kemudian sejak 2017 OPM tidak lagi mengikuti sidang yang diselenggarakan oleh ULMWP.

OPM sendiri lebih berfokus pada tindakan kekerasan dan konfrontasi langsung dengan Aparat Keamanan Pemerintah Indonesia. Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan Desember, terjadi ketegangan antara aparat keamanan (TNI-Polri) dengan OPM hingga menimbulkan konflik bersenjata. Konflik yang berkepanjangan mengharuskan ribuan warga Nduga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Pada saat proses pengungsian, terdapat 2 warga yang diduga pro-kemerdekaan Papua tertembak oleh aparat anggota Tim Satgas Pamtas Yonif PR 330/TD mengakibatkan korban meninggal ditempat karena dianggap mempunyai hubungan dengan kelompok OPM (Amindoni, 2020). Hal ini menyebabkan isu pelanggaran HAM juga menjadi perhatian banyak pihak akibat peristiwa tersebut.

Bahkan sepanjang 2019, konfrontasi antara aparat keamanan dan kelompok kriminal separatis bersenjata (KKSBB) terjadi sebanyak 21 kali yang menewaskan 10 warga sipil, 9 prajurit TNI dan 2 personel Polri. Tindakan kekerasan ini terus berlanjut di tahun 2020 di mana ada 100 peristiwa konflik di Papua dan Papua Barat, meningkat dibanding 2019 yang memiliki 96 peristiwa konflik (Chairil & Sadi, 2020). Sementara tindakan lainnya selama tahun 2021, OPM telah melakukan aksi pembakaran pesawat Mission Aviation Fellowship (MAF) di Kabupaten Intan Jaya, penembakan terhadap helikopter di Kabupaten Mimika, pembakaran tower BTS di Kabupaten Puncak, dan serangkaian serangan terhadap warga sipil yang menambah ketegangan di wilayah Papua. Selain itu, OPM juga melakukan penyerangan terhadap penduduk non-Papua yang berada di Papua, seperti serangan terhadap tukang ojek, guru, dan pendatang di Kabupaten Intan Jaya dan Puncak. Selain itu, OPM juga menyebarkan motif anti-pendatang sebagai simbol eksploitasi yang mendominasi ekonomi lokal dan merusak tatanan sosial masyarakat asli Papua. OPM juga melakukan penahanan terhadap pilot dan pesawat Susi Air di Kabupaten Puncak dan pembakaran fasilitas pendidikan serta helikopter milik perusahaan PT Ersa Air di Bandara Amingguru, Ilaga (Rasji & Whisnu Aji P. S, 2024).

Meskipun demikian, keberadaan kelompok-kelompok separatisme gerakan pro-kemerdekaan Papua ini baik OPM maupun ULMWP dan kelompok lainnya sangat mengancam keutuhan wilayah Indonesia serta stabilitas nasional bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sesuai dengan model adaptasi preservatif yang disebutkan oleh James N. Rosenau, untuk menyeimbangkan tuntutan internal dan eksternal yang muncul sebagai respons terhadap perubahan lingkungan domestik dan internasional secara bersamaan, maka Pemerintah Indonesia menerapkan strategi sebagai berikut.

#### **A. Strategi Adaptasi Indonesia dalam Merespon Tuntutan Eksternal**

Perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal Indonesia yaitu adanya kecaman dari berbagai negara termasuk Fiji, Vanuatu, dan Kepulauan Solomon selama tahun 2016- 2021. Kecaman ini ditujukan kepada pemerintah Indonesia dengan adanya dugaan pelanggaran HAM terhadap etnis Melanesia yang berada di Papua yang diangkat oleh ULMWP. Isu ini bahkan sudah diinternasionalisasikan dengan dibawa ke forum-forum seperti PBB dan MSG. Adapaun respon dari pemerintah Indonesia yaitu melakukan berbagai kerjasama sebagai bentuk respon tidak langsung di berbagai bidang dengan tiga negara yang melakukan kecaman dan secara langsung dengan forum MSG. Kerjasama ini diharapkan dapat meredam kecaman-kecaman yang diberikan kepada Indonesia serta untuk meningkatkan citra baik Indonesia di dunia Internasional.

Upaya untuk memaksimalkan strategi yang direncanakan oleh Indonesia, Pemertintah membentuk Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID) atau Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia (LDKPI) yang secara khusus bertugas sebagai lembaga yang mengurus dan menangani bantuan luar negeri Indonesia dibawah naungan kementerian keuangan. Tugas utama dari lembaga ini yaitu untuk mengelola dana kerjasama pembangunan internasional (*endowment fund*) dan biaya operasional kegiatan Indonesian AID. Selain itu, Indonesian AID juga mengelola hibah, investasi, kemitraan, monitoring, dan evaluasi terhadap program bantuan yang telah dilaksanakan berdasarkan arahan Menteri Keuangan. Pada tahun 2019-2022 dana yang dialokasikan Indonesian AID tersalurkan ke beberapa program seperti pelatihan *International South Pacific-Indonesian Entrepreneurship Camp: Sharing Experience to Achieve Sustainable Development Goals (SDGs)*, *International Workshop on Disaster Risk Management*, pembangunan *Agriculture Training Centre* di Fiji dan *Protocol Training in Tuvalu 2019* (Shifa, 2024). Sejak didirikan, Indonesia AID didirikan pada 18 Oktober 2019 terhitung telah mengeluarkan bantuan dana sebesar Rp 523,56 miliar. Dana tersebut dialirkan setidaknya kepada negara-negara yang berada di kawasan Asia sekitar 37%, di kawasan Pasifik (15,7%), di kawasan Afrika (27%), dan negara-negara yang berada di kawasan lainnya seperti Eropa dan Amerika Latin (Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia, 2024).

Indonesia mulai melakukan pendekatan kepada negara-negara Pasifik Selatan khususnya negara yang menjadi anggota Melanesia Spearhead Group (MSG). MSG merupakan sebuah forum regional yang dibentuk atas dasar adanya kesamaan etnis yaitu etnis Melanesia diantara negara-negara anggotanya. Dalam hal ini, isu Papua menjadi pembahasan utama di forum ini. Untuk merespon keadaan tersebut, Indonesia gencar melakukan kerjasama secara langsung dengan forum ini sebagai strategi adaptif. Pada tahun 2016 berbagai kerjasama teknis telah dilakukan oleh Indonesia dengan negara-negara anggota MSG. kerjasama tersebut terjadi pada sektor perikanan, *good governance*, pertanian, pendidikan, *disaster management*, dan pemberdayaan perempuan. Sekitar 130 program telah dilakukan dengan melibatkan 583 peserta dari negara-negara anggota MSG (Kesuma, 2018). Langkah selanjutnya, tahun 2022 Indonesia menjadi tuan rumah *4th MSG Regional Security Strategy (RSS) Working Group* di Bali. RSS mempunyai tujuan untuk mewujudkan keamanan kawasan dan upaya dalam menghadapi tantangan keamanan tradisional dan non- tradisional yang memperhatikan kesejahteraan dan keamanan masyarakat. Pertemuan tersebut dihadiri oleh delegasi Vanuatu, Papua Nugini, Fiji, dan Kepulauan Solomon (Anggoro, 2022).

Pada tahun 2024, Indonesia menyatakan komitmennya untuk melakukan penguatan kerjasama dengan forum MSG dan negara-negara anggotanya. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Pahala Nugraha Mansury dalam pertemuan Budget Foreign Ministers Meeting MSG pada 27 Maret 2024 di Port Villa, Vanuatu (Mandasari, 2024). Selanjutnya, pada tanggal 28 November 2024, Indonesia mengirimkan perwakilan untuk menghadiri Pertemuan Tingkat Menteri Melanesian Spearhead Group (MSG) di Port Villa, Vanuatu. Wakil Menteri Luar Negeri Indonesia, Armanatha Nasir sebagai perwakilan RI menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk memperkuat kerjasama dengan negara-negara MSG. Ada tiga prioritas utama dan menjadi perhatian bagi Indonesia. Pertama, Indonesia akan memberikan bantuan kepada negara-negara MSG dalam menghadapi kenaikan permukaan laut dan dampak dari perubahan cuaca (iklim). Selain itu, Indonesia berencana untuk melanjutkan program pelatihan dalam sektor kesehatan, perikanan, pelatihan kejuruan dan penegak hukum. Kedua, dalam sektor ketahanan kawasan, di mana Indonesia memberikan usulan untuk membuat

kesinergian program MSG dengan Archipelagic and Island States Forum (AIS) untuk menghadapi situasi global yang semakin menantang. Ketiga, Indonesia bersedia menjadi penghubung bagi Kawasan Pasifik dengan Kawasan Asia Tenggara dalam kerjasama pada beberapa sektor seperti sektor infrastruktur, pembangunan berkelanjutan, dan perubahan iklim (Kementerian Luar Negeri RI, 2024). Beberapa pendekatan yang dilakukan Indonesia tersebut merupakan upaya adaptasi untuk merespon tuntutan dari pihak eksternal tanpa mengorbankan keutuhan wilayah Indonesia (tanpa melepaskan status Papua dari Indonesia).

## **B. Strategi Adaptasi Indonesia dalam Merespon Tuntutan Internal**

1. Melabeli status OPM sebagai Organisasi Teroris dan tidak mengakui keberadaan dan Deklarasi Kemerdekaan dari ULMWP

Akibat aksi-aksi yang dilakukan OPM seperti pembunuhan maupun tindakan kekerasan baik terhadap aparat keamanan Indonesia maupun sebagian warga sipil, Pemerintah Indonesia kemudian mengubah status OPM yang semula merupakan organisasi kriminal berubah menjadi organisasi teroris pada 29 April 2021. Tindakan ini juga merupakan bagian dari kepentingan Indonesia dalam memperoleh legitimasi di level nasional maupun internasional untuk melakukan langkah-langkah operasional dalam menghadapi OPM. Melalui penyematan identitas “teroris” ke OPM, pemerintah Indonesia dapat menggunakan norma internasional “*war on terror*” sebagai legitimasi terhadap tindakan-tindakan represif, pelacakan maupun pembekuan pendanaan operasional OPM. Tindakan ini juga bagian dari strategi Indonesia dalam menepis tindakan pelanggaran HAM yang dilontarkan oleh dunia internasional kepada Indonesia dalam mengatasi isu Papua (Kusuma et al., 2022).

Indonesia juga dapat menerapkan strategi baru dalam mengirimkan tentara militernya, yang semula hanya menempatkan pasukan yang berkualifikasi Zeni Tempur (zipur) selama tahun 2018-2020. Dengan berubahnya status OPM menjadi organisasi teroris, Pemerintah Indonesia sejak tahun 2021, pasca dikeluakannya label tersebut, mengirim pasukan militer ke Papua di bidang non-organik yang memiliki kualifikasi tempur. Ada sekitar 13 pasukan non-organik yang dikirim dari TNI dan Polri sejak Januari 2022 hingga Agustus 2022. Dengan perkiraan total 3.000 personel TNI dan 657 personel Brimob Polri (Pradnyana, 2023).

Sementara itu, pemerintah Indonesia merespon keberadaan ULMWP yang mendeklarasikan pemerintah sementara Negara Republik Papua Barat pada Desember 2020, menganggap tindakan ULMWP sebagai tindakan agitasi dan propaganda keluar dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Bahkan apa yang telah dideklarasikan tersebut dianggap Pemerintah Indonesia sebagai negara ilusi karena pembentukan negara oleh Benny Wenda tidak sesuai dengan Konvensi Montevideo yang tidak memenuhi unsur-unsur berdirinya sebuah negara (rakyat, wilayah, pemerintah dan pengakuan dari negara lain) (Martianto & Isnaini, 2021).

2. Pemekaran Wilayah dan Revisi UU Otonomi Khusus Papua

Salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Indonesia terkait dengan adanya gerakan separatisme yang terus bertransformasi di Papua, Pemerintah Indonesia kemudian berusaha memenuhi hak dan kewajiban dasar rakyat Papua, melalui penyusunan rancangan undang-undang Otonomi Khusus Papua yang berpedoman pada adat istiadat rakyat Papua, nasionalisme, nilai-nilai universal maupun penghormatan terhadap demokrasi dan hak-hak asasi manusia. Dalam hal ini, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU Otsus Papua). Pemberian Otsus Papua ini merupakan pemberian kewenangan yang luas bagi provinsi dan rakyat Papua di bawah kerangka NKRI, untuk mengatur dan mengurus wilayah dan rakyatnya sendiri secara otonom (Leonita, 2022).

Dalam penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua juga diatur mengenai perubahan terkait mekanisme pemekaran dan pembentukan daerah baru di Provinsi Papua dan Papua Barat melalui mekanisme *top down*. Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 menyebutkan bahwa “Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah Provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua”. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut kemudian menjadi dasar hukum bagi pemerintah pusat dalam melakukan empat pemekaran daerah provinsi di Papua pada tahun 2022 (Amirullah, 2023).

Pemerintah Indonesia sendiri saat ini melakukan moratorium pemekaran wilayah, namun khusus untuk Papua Pemerintah melakukan pemekaran provinsi dari dua menjadi enam, yaitu: Papua; Papua Barat; Papua Selatan; Papua Pegunungan; Papua Tengah; dan Papua Barat Daya. Pertimbangan atas kebijakan pemekaran wilayah ini atas dasar pertimbangan politik karena di Papua terjadi gejolak sosial termasuk gejolak kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) serta untuk meredakan tekanan-tekanan dari LSM-LSM yang ada di Papua maupun tekanan internasional (Effendy, 2023).

## KESIMPULAN

Gerakan pro-kemerdekaan Papua, yang dilancarkan oleh beberapa kelompok memiliki pendekatan yang berbeda-beda. Meski tidak diakui oleh OPM, keberadaan entitas ULMWP sebagai salah satu gerakan separatisme pro-kemerdekaan Papua memiliki bentuk strategi jangka panjang yang tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga mengandung dimensi taktis dengan orientasi pada legitimasi internasional dan konsolidasi internal. Kelompok tersebut telah secara konsisten membangun narasi politik dalam memperluas dukungan dari lintas batas negara. Berbeda dengan kelompok separatisme OPM yang lebih menekankan pada perjuangan secara frontal yang berhadapan langsung dengan aparat keamanan Pemerintah Indonesia. Namun, kelompok separatisme yang ada di Papua memiliki kesamaan dalam rangka memperjuangkan gerakan kemerdekaan di tanah Papua dengan memanfaatkan isu pelanggaran HAM dan isu rasisme yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh sebab itu, dunia internasional melakukan kecaman dan kritikan atas tindakan Indonesia tersebut. Dalam hal ini, strategi *adaptation preservative* merupakan strategi yang tepat yang digunakan Pemerintah Indonesia untuk merespon adanya tuntutan internal dan eksternal tersebut.

Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami strategi politik kontemporer yang dijalankan oleh aktor non-negara dalam memperjuangkan hak kolektif dan pengakuan internasional. Di sisi lain, negara juga perlu merespon tindakan dari aktor non-negara dalam mempertahankan struktur esensialnya yaitu kedaulatan negaranya. Dengan menyoroti interaksi antara simbolisme aktor non negara dan struktur kelembagaan yang

menyusunnya, studi ini membuka ruang bagi analisis yang lebih kritis terhadap praktik representasi politik dan konstruksi legitimasi dalam konteks konflik yang berkepanjangan.

## REFERENSI

- Amindoni, A. (2020, July 30). Papua, konflik di Nduga: 'Korban terus berjatuhan', demonstrasi menuntut keadilan warga yang ditembak, pemerintah diminta ubah 'pola' kebijakan. Diambil kembali dari BBC News Indonesia: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-53593107>
- Amirullah, A. (2023). Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan Dan Politik Islam*, 3(2), 167–185. <https://doi.org/10.14421/f55by168>
- Anggoro, W. D. (2022, June 7). 4th MSG Regional Security Strategy Working Group Held in Bali. Diambil kembali dari Medcom.id: <https://www.medcom.id/english/world/4KZqIOrk-4th-msg-regional-security-strategy-working-group-held-in-bali>
- Bramasta, B., & Nuryananda, P. F. (2021). Skripsi Strategi Pemerintah Indonesia Meredam Isu Papua: Analisis Bantuan Luar Negeri Indonesia ke Tiga Negara Pasifik Selatan (Fiji, Kep. Solomon, dan Vanuatu) Tahun 2015-2019. Surabaya: UPN Jatim.
- Chairil, T., & Sadi, W. A. (2020). Konflik Papua: Pemerintah Perlu Mengubah Pendekatan Keamanan dengan Pendekatan Humanis. In Centre for Business and Diplomatic Studies (CBDS) Commentaries: Vol. Oktober.
- CNN Indonesia. (2020). OPM Bongkar Siasat Benny Wenda di ULMWP Rebut Tanah Papua. 4 Desember 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201204121743-20-577939/opm-bongkar-siasat-benny-wenda-di-ulmwp-rebut-tanah-papua>
- Effendy, R. G. (2023). Analisis Otonomi Khusus Papua Dalam Perspektif Orang Asli Papua. *Binamulia Hukum*, 12(2), 309–322. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.436>
- Febrian, M., Adriansyah, M. I., & Dewi, D. A. (2024). Penyebab Aksi Separatisme OPM Masih Ada Hingga Saat Ini. *PRIMER (Jurnal Ilmiah Multidisiplin)*, 40-43.
- Hasly, M. H. (2020). Skripsi Perubahan Kebijakan Open-Door Policy Turki Terhadap Pengungsi Suriah Tahun 2016. Surabaya: UPNV Jatim.
- IPAC. (2015). The Current Status of the Papuan Pro Independence Movement. In IPAC Report No. 21 (Issue 24 August). <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/43/The-Current-Status-of-the-Papuan-Pro-Independence-Movement>
- Kementerian Luar Negeri RI. (2024, November 11). *Indonesia Tegaskan Komitmen Kerja Sama dengan Negara-Negara Anggota Melanesian Spearhead Group di Tengah- Tengah Tantangan Global*. Diambil kembali dari Kementerian Luar Negeri RI: <https://kemlu.go.id/berita/indonesia-tegaskan-komitmen-kerja-sama-dengan-negara-negara-anggota-melanesian-spearhead-group-di-tengah-tengah-tantangan-global?type=publication>
- Kesuma, R. F. (2018). Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Meningkatkan Hubungan Dengan Negara-Negara Melanesia Di Era Presiden Joko Widodo 2014-2016. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Kusuma, A. J., Setiawan, M. C. A., Ilmar, A., & Situmeang, N. (2022). Perubahan Status Organisasi Papua Merdeka (OPM) Menjadi Organisasi Teroris Oleh Pemerintah Indonesia: Sebuah Analisis Dalam Perspektif HAM. *JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan Dan Otonomi Daerah)*, 7(1), 1–22. <https://doi.org/10.52447/gov.v7i2.6087>
- Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia. (2024, October 18). 5 Tahun Berdiri, Indonesian AID Dukung Diplomasi & Pembangunan Dunia. Diambil kembali dari Lembaga Dana Kerjasama Pembangunan Indonesia: <https://ldkpi.kemenkeu.go.id/berita/Capaian5tahun>
- Leonita, D. M. (2022). Politik Pembentukan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Dan Penerapannya Pada Masyarakat Adat Kabupaten Teluk Bintuni. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 4(2), 186–194. <https://doi.org/10.35814/otentik.v4i2.3738>
- Mandasari, J. R. (2024, March 28). Indonesia Komitmen Perkuat Kerja Sama dengan Kelompok Melanesia. Diambil Kembali dari RRI.co.id: <https://rri.co.id/internasional/612200/indonesia-komitmen-perkuat-kerja-sama-dengan-kelompok-melanesia>
- Martianto, R. W. U., & Isnaini, M. (2021). Kontra Propaganda Deklarasi Negara Papua Barat dalam Konstruksi Pemberitaan Tempo.co. *Jurnal Kajian Jurnalisme*, 05(01), 48–63. <https://doi.org/10.24198/jkj.v5i1.31885>

- Moleong, L. J. (2018). Metodologi penelitian kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nainggolan, P. P. (2014). International Activities of Papua Separatist Movement. *Kajian*, 19(3), 181–199.
- Natalia, K. (2021). Analisis Diplomas Indonesia Terhadap Vanuatu Terkait Isu Papua Merdeka. Jakarta: Universitas Satya Negara Indonesia.
- Nugroho, K. A., Deksino, G. R., Nugroho, A. D., & Kamarani, S. (2023). Analisis Sejarah dan Kontemporer Gerakan Separatisme di Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 95–100. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4699>
- Pamuji, R., Efendi, D., & Mahadika, A. (2020). Nasionalisme Papua Dalam Organisasi Aliansi Mahasiswa Papua (Studi Kasus: Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Yogyakarta). *Jurnal Dinamika*, 1(2), 33–54. <https://doi.org/10.18326/dinamika.v1i2.33-54>
- Petersen, N. (1977). Adaptation as a Framework for the Analysis of Foreign Policy Behavior. *Cooperation and Conflict*, 12(4), 221–250. <http://www.jstor.org/stable/45083210>
- Pradnyana, I. P. H. (2023). THE PATH OF SECURITIZATION: TRANSFORMATION OF FREE PAPUA MOVEMENT (OPM) TERMINOLOGY FROM ARMED CRIMINAL GROUPS TO SEPARATIST AND TERRORIST GROUPS. *Journal of Terrorism Studies*, 5(1), Article 7. <https://doi.org/10.7454/jts.v5i1.1062>
- Prasetyo, H., & Zahidi, M. S. (2022). Diplomas Indonesia Di Kawasan Pasifik Selatan Dalam Rangka Menjaga Kedaulatan Papua. *Journal of Diplomacy and International Studies*, 17-19.
- Rasji, & Whisnu Aji P. S. (2024). Tindakan Organisasi Papua Merdeka (OPM) Berdasarkan Undang - Undang No 34 Tahun 2004. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik*, 5(2), 1580–1589. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2.3532>
- Sahanda, D. H. (2020). Skripsi Diplomas Publik Indonesia Terhadap Negara-Negara Di Kawasan Pasifik Selatan Terkait Organisasi Papua. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
- Shifa, J. M. (2024). Kerja Sama Pembangunan Internasional Indonesia Dan Negara Pasifik Selatan Melalui Indonesian-Aid. *e-skripsi Universitas Andalas*.
- ULMWP. (n.d.). One People, One Soul. <https://www.ulmwp.org/ulmwp>
- We Need To Talk About West Papua Team. (2021). We Need to Talk About West Papua. <https://kemlu.go.id/download/L1NoYXJlZCUyMERvY3VtZW50cy9ERVNFTUJFUyUyMDIwMjEvRU5HLnBkZg==>
- Yani, M. (2017). Perspektif-Perspektif Politik Luar Negeri: Teori dan Praksis. Universitas Padjajaran.